

# PENGARUH PENDAPATAN DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR

**Triska Omega Fatmawati**  
*triskaomega.to@gmail.com*  
Sapari

**Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya**

## ABSTRACK

*This research aimed to examine the effect of Local Revenue that consist of Local-owned Source Revenue, General Allocation Fund, and Specifix Allocation Fund on Local Government Financial Performance of districts/cities in East Java. The research was quantitative. Moreover, the data collection technique used senses/total sampling; in wich the sample was taken from all population. In line with, there were 38 districts/cities in East Java as sample with 3 years observation (2016-2018). While, the data was secondary in form of Budget Realization Report which taken from BPKAD, East Java. Mor over, the data analysis technique used multiple linier regression with SPSS (Statistical Product and Social Science) 25. The research result concluded Local-owned Source Revenue Fund had positive effect on Local Government Financial Performance of districts/cities in East Java during 2016-2018. Likewise, Specifix Allocation Fund had positive effect on Local Government Financial Performance of districts/cities in East Java during 2016-2018. On the other hand, General Allocation Fund had negative effect on Local Government Financial Performance of districts/cities in East Java during 2016-2018.*

*Keywords: local-owned source revenue, general allocation fund, specifix allocation fund*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pendapatan daerah yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode sensus/*sampling* total, yaitu pemilihan sampel dengan menjadikan seluruh anggota populasi sebagai sampel. Berdasarkan metode *sampling* total didapatkan sampel sebanyak 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Periode pengamatan sampel yaitu tahun 2016-2018 dengan menggunakan data sekunder yaitu berupa Laporan Realisasi Anggaran yang diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program aplikasi SPSS versi 25. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Sedangkan dana alokasi umum berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.

Kata Kunci: pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus.

## PENDAHULUAN

Adanya krisis ekonomi tahun 1997 di Indonesia, melahirkan era reformasi pada tahun 1998 yang membawa perubahan bagi Indonesia. Perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi merupakan salah satu bentuk perubahannya. Perubahan sistem ini diberlakukan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang selanjutnya diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan perubahan pertama yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 dan perubahan terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Peraturan-

peraturan inilah yang menjadi bagian utama dalam reformasi di bidang keuangan daerah (Halim, 2007:2).

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang melaksanakan otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan kekuasaan dan wewenang bagi daerah untuk mengurus dan mengatur sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi dari daerah itu sendiri demi tercapainya pembangunan yang menyeluruh. Dengan adanya otonomi daerah yang mengutamakan kemandirian akan mewujudkan efisiensi dan efektivitas pendayagunaan sumber daya keuangan (Abdullah et al., 2015). Oleh karena itu, diperlukan adanya laporan keuangan yang handal dan dapat dipercaya yang mencerminkan kondisi sumber daya keuangan daerah tersebut.

Kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri, mengakibatkan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk meningkatkan kinerjanya sebagai pertanggungjawaban, terutama dalam bidang keuangan. Peningkatan kinerja dari pemerintah daerah dapat terwujud, apabila pengelolaan dalam keuangan daerah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan tercermin dalam APBD, dimana APBD tersebut menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan, serta pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah (Kamaroeallah, 2017). Penyusunan APBD akan disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan keuangan daerah seperti kemampuannya dalam meningkatkan penerimaan pendapatan daerahnya (Putri dan Darmayanti, 2019).

Pengukuran Kinerja pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan dengan menggunakan analisis rasio keuangan terhadap APBD. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan hasil yang telah dicapai pada suatu periode dengan periode sebelumnya, sehingga dapat mengetahui kecenderungan yang terjadi. Halim (2007:231) menyatakan bahwa terdapat empat rasio yang dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu rasio kemandirian, rasio efektivitas dan efisiensi pendapatan asli daerah, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dari kegiatan ekonomi dari masing-masing daerah, sehingga PAD merupakan salah satu pilar yang menunjukkan kemandirian suatu daerah (Budianto dan Alexander, 2016). Untuk dapat mewujudkan kemandirian daerah, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan lokal untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Indriani dan Sastradipraja, 2014). Kemampuan daerah dalam menggali Pendapatan Asli Daerahnya akan berpengaruh terhadap perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, akan semakin kecil ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat, sehingga dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah (Djuniar dan Zuraida, 2018). Sejalan dengan diterapkannya otonomi daerah yang menyebabkan pemerintah daerah harus mampu menghasilkan pendapatan asli daerah agar dapat meminimalkan ketergantungan pada bantuan pendanaan dari pusat (Antari dan Sedana, 2018).

Kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus daerahnya sendiri bukan berarti pemerintah pusat lepas tangan, salah satu wujud peran dari pemerintah pusat yaitu melalui pemberian dana perimbangan yang memiliki kontribusi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Ayu, 2018). Dana perimbangan terdiri dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam. Kebijakan penggunaan semua dana perimbangan ini diserahkan kepada daerah, sesuai dengan kebutuhan yang ada pada masing-masing daerah. Peran dana perimbangan khususnya dana alokasi umum (DAU) menjadi sangat penting dalam upaya

menyeimbangkan perbedaan potensi dan kebutuhan antar daerah dan menyeimbangkan perbedaan sumber daya serta beban fungsi antar tingkat pemerintah (Susanti dan Ratih, 2018). Besarnya dana perimbangan dari pemerintah pusat akan menunjukkan semakin kuatnya pemerintah daerah bergantung kepada pemerintah pusat dalam memenuhi kebutuhan daerahnya (Julitawati, 2012).

Pada kenyataannya, saat ini belum sepenuhnya pemerintah daerah di Indonesia berhasil mencapai tingkat kemandirian keuangan yang diharapkan. Otonomi daerah tidak membuat pemerintah daerah berupaya untuk meningkatkan kapasitas dan penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Masih banyak pemerintah kabupaten dan kota di daerah yang sangat bergantung pada dana perimbangan dari pemerintah pusat (Anwar, 2019). Dari latar belakang diatas dapat diidentifikasi rumusan masalah yaitu apakah pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menguji pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

## TINJAUAN TEORITIS

### *Teori Stewardship (Stewardship Theory)*

Teori *stewardship* yang sering disebut sebagai teori pengelolaan (penatalayanan) didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana seorang manajer tidak berfokus pada kepentingan individu, tetapi akan berperilaku sesuai dengan kepentingan bersama sehingga lebih mengupayakan kepentingan dan keinginan prinsipal serta mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas, dan kejujuran kepada pihak lain (Raharjo, 2007).

Teori Stewardship mengasumsikan hubungan yang kuat antara kesuksesan dalam sebuah organisasi dengan pemilik, dimana pemerintah daerah berupaya maksimal dalam menjalankan roda pemerintahan untuk mencapai tujuannya yaitu kesejahteraan masyarakat. Apabila tujuan ini mampu dicapai oleh pemerintah daerah maka rakyat selaku pemilik akan merasa puas terhadap kinerja pemerintah (Ramadhan, 2018).

Keterkaitan penelitian ini dengan Teori Stewardship adalah bahwa Pemerintah Daerah bertindak sebagai steward, yang merupakan penerima amanah dalam penggunaan penerimaan daerah untuk kepentingan pembangunan daerah menuju kearah yang lebih mandiri dari segi keuangan. Selain itu, pemerintah daerah melakukan pendekatan governance dalam melakukan pengelolaan yang baik secara bersama-sama dan kooperatif mengarahkan seluruh kemampuan dan kualitasnya dalam mengelola penerimaan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

### **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dipresentasikan setiap tahun oleh eksekutif, memberikan informasi secara rinci kepada DPR/DPRD dan masyarakat tentang program-program yang direncanakan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan bagaimana program-program tersebut dibiayai. APBD merupakan salah satu mesin pendorong pertumbuhan ekonomi dan tercapainya target serta sasaran makro ekonomi daerah yang diarahkan untuk mengatasi berbagai kendala dan permasalahan pokok yang merupakan tantangan dalam mewujudkan agenda masyarakat yang sejahtera dan mandiri (Wenny, 2012). APBD menjelaskan segala bentuk kegiatan pemerintah daerah dalam mencari sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk mencapai tujuan pemerintah daerah dalam periode yang telah ditetapkan.

### **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh oleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pendapatan asli daerah bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Sumber Pendapatan Asli Daerah berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

### **Dana Alokasi Umum (DAU)**

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) adalah pendapatan yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang pengalokasiannya untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pemberian dana alokasi umum ini bertujuan untuk penyamaan kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan. Dana Alokasi Umum (DAU) juga merupakan jaminan keseimbangan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat. Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar, tetapi kebutuhan fiskal kecil akan memperoleh alokasi DAU relatif kecil. Sebaliknya, daerah yang potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi DAU relatif besar (Marizka, 2013).

### **Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Khusus adalah pendapatan yang bersumber dari APBN (Anggaran pendapatan dan Belanja Negara) yang pengalokasiannya kepada daerah tertentu. Dana Alokasi Khusus bertujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan prioritas nasional di bidang tertentu, khususnya dalam upaya memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar kepada masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan, Dana Alokasi Khusus diberikan kepada pemerintah berdasarkan kriteria yang terdiri dari kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

### **Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara atau daerah selama satu periode. Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan wujud dari pertanggungjawaban kepada masyarakat yang didalamnya memuat sumber daya ekonomi dan kewajiban suatu entitas pemerintah pada periode tertentu yang penyusunannya berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Laporan keuangan pemerintah daerah yang dibuat dalam setiap periodenya akan menggambarkan realisasi dari anggaran tersebut sehingga akan tampak bagaimana pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerahnya.

### **Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Pengukuran kinerja keuangan untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja yang dilakukan dengan membandingkan hasil kerja dan pelaksanaannya. Peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat, dimana semakin besar kemampuan suatu daerah dalam menggali

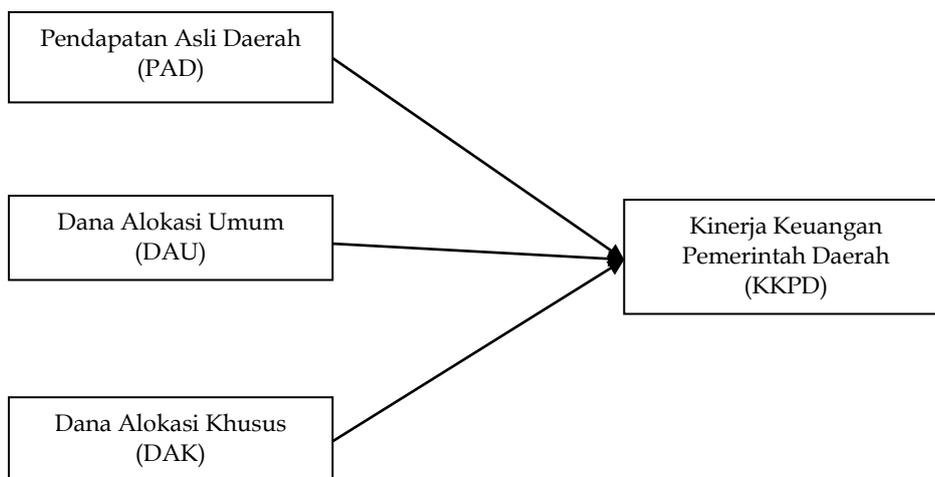
potensi-potensi daerah untuk membiayai jalannya sistem pemerintahan dan pembangunan daerah, serta digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara optimal. Mardiasmo (2018:151) menyatakan bahwa tujuan dari pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah adalah untuk memenuhi tiga maksud. Pertama, membantu pemerintah untuk tetap fokus pada tujuan dan sasaran program kerja. Kedua, sebagai sarana pengalokasian sumber daya dan pengambilan keputusan. Ketiga, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

**Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Salah satu alat yang dapat digunakan untuk menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan daerahnya yaitu dengan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan (Halim, 2007:231). Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya pada APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun demikian, agar pengelolaan keuangan daerah transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilakukan (Halim dan Kusufi, 2012). Rasio-rasio tersebut diantaranya adalah rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efisiensi, rasio efektivitas, dan rasio pertumbuhan.

**Rerangka Konseptual**

Berdasarkan latar belakang dan landasan teori yang telah dijelaskan diatas, maka rerangka konseptual dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 1**  
**Rerangka Konseptual**

**Pengembangan Hipotesis**

**Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

PAD adalah tulang punggung dari pembiayaan daerah, karena paling berkontribusi terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memprioritaskan pertumbuhan investasi yang nantinya diharapkan dapat memberikan dampak dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pada umumnya tingkat kontribusi PAD akan menunjukkan tingkat kemampuan daerah dalam membiayai pengeluarannya sendiri sehingga memperlihatkan kinerja keuangan yang positif dari daerah itu. Kinerja keuangan yang positif dapat diartikan sebagai kemandirian keuangan dalam mendanai kebutuhan daerah dan menunjukkan kemampuan pelaksanaan otonomi daerah (Hamdani, 2014). Penelitian yang dilakukan Indriani dan Sastradipraja (2014), menyatakan

bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah untuk rasio kemandirian. Wenny (2012) juga menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

$H_1$  = Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

### **Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Besarnya DAU yang diterima oleh daerah akan menggambarkan tingkat kemandirian yang dimiliki oleh daerah. Semakin besar DAU yang diterima maka akan semakin besar ketergantungan pemerintah daerah kepada bantuan pendanaan dari pemerintah pusat sehingga akan menurunkan kemandirian keuangan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mampu mengoptimalkan pemanfaatan DAU untuk meningkatkan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sehingga mampu meningkatkan kinerja keuangan dalam hal kemandirian daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Putri (2016) Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan Wiguna (2015) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah berdasarkan rasio efisiensi. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

$H_2$  = Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

### **Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Perolehan dan pemanfaatan DAK oleh daerah harus mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dana alokasi khusus dimaksudkan untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan prioritas nasional, khususnya membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat dalam rangka percepatan pembangunan daerah. Semakin besar DAK yang dialokasikan pemerintah pusat kepada daerah maka dapat dikatakan daerah tersebut kurang mandiri karena masih mengandalkan dana bantuan dari pemerintah pusat sebagai penerimaan utamanya, begitupula sebaliknya (Marizka, 2013). Penelitian yang dilakukan oleh Marizka (2013) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Sedangkan Susanti dan Ratih (2018) juga menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

$H_3$  = Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi Penelitian**

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah menggunakan penelitian kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Metode dengan pendekatan kuantitatif merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu (Sugiyono, 2016:23). Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota yang terdapat di Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota. Objek penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2016-2018.

### **Teknik Pengambilan Sampel**

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik sensus/sampling total, yaitu teknik pengambilan sampel dimana seluruh anggota dalam

populasi dijadikan sampel. Sehingga, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur yang berjumlah 38 terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu berupa data dokumenter yang dikumpulkan dengan mempelajari catatan dari dokumen yang ada. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Soewardji (2012:147) menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen, publikasi yang sudah berbentuk jadi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari instansi yang terkait yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur berupa Laporan Realisasi APBD seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2016-2018. Selain itu data diperoleh melalui studi kepustakaan dan internet dengan membaca dan mengutip beberapa referensi yang mempunyai keterkaitan dengan variabel-variabel yang diuji.

### **Variabel dan Definisi Operasional Variabel**

#### **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah merupakan seluruh penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi daerah itu sendiri dan dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan + Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Rasio Pendapatan Asli Daerah diukur dengan melihat nilai PAD yang telah disajikan dalam Laporan Realisasi APBD kabupaten/kota yang bersangkutan dibandingkan dengan total penerimaan daerah (Mahmudi, 2010):

$$\text{Rasio PAD} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\%$$

#### **Dana Alokasi Umum (DAU)**

Dana Alokasi Umum merupakan dana transfer yang bersifat terikat dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pengalokasian dana alokasi umum didasarkan pada presentase tertentu dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN. Dana alokasi umum dalam penelitian ini diperoleh dari Laporan Realisasi APBD pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dibandingkan dengan total penerimaan daerah (Marizka, 2013):

$$\text{Rasio DAU} = \frac{\text{DAU}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\%$$

#### **Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Dana Alokasi Khusus merupakan dana transfer yang sifatnya terikat dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah. Dana Alokasi Khusus dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu dalam rangka desentralisasi untuk mendanai kegiatan khusus yang ditentukan oleh pemerintah atas dasar prioritas nasional dan untuk mendanai kegiatan khusus yang diusulkan oleh daerah tertentu. Dana alokasi khusus dalam penelitian ini diperoleh dari Laporan Realisasi APBD pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dibandingkan dengan total penerimaan daerah (Marizka, 2013):

$$\text{Rasio DAK} = \frac{\text{DAK}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\%$$

### Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam penelitian ini, kinerja keuangan pemerintah daerah diukur dengan menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan tingkat ketergantungan daerah terhadap pendapatan transfer yang bersumber dari pihak ekstern. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan dari besar kecilnya pendapatan asli daerah yang diperoleh dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain yaitu bantuan pemerintah pusat/provinsi dan pinjaman. Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah akan memperlihatkan jika tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah demikian pula sebaliknya. Rasio tingkat kemandirian keuangan daerah diukur sebagai berikut (Halim, 2007:231):

$$\text{Rasio kemandirian} = \frac{PAD}{\text{Bantuan Pemerintah pusat/provinsi dan pinjaman}} \times 100\%$$

### Teknik Analisis Data

#### Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah penggunaan statistik untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Statistik deskriptif memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari nilai minimal, nilai maksimal, rata-rata (mean), dan standar deviasi.

#### Uji Asumsi Klasik

##### Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Untuk menguji apakah distribusi data normal atau tidak dapat digunakan dua cara yaitu analisis grafik dan analisis statistik. Analisis grafik dengan cara menganalisis grafik Normal Probability (P-Plot of Regression, Standardized Residual) yaitu dapat dilihat pada penyebaran data (titik) yang berada pada sumbu diagonal dari grafik. Apabila data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka menunjukkan pola telah terdistribusi secara normal. Ini berarti model regresi telah memenuhi asumsi normalitas, dan sebaliknya (Ghozali, 2018:163). Salah satu uji statistik yang dapat digunakan adalah uji statistik non-parametrik kolmogorov-smirnov. Kriteria uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov yaitu jika nilai signifikansi  $> 0,05$  maka data berdistribusi normal dan sebaliknya jika nilai signifikansi  $< 0,05$  maka data berdistribusi tidak normal (Ghozali, 2018:163).

##### Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bermaksud menguji model regresi apakah ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai Tolerance (TOL) dan Variance Inflation Factor (VIF). Nilai yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai  $TOL \leq 0,10$  dan nilai  $VIF \geq 10$  (Ghozali, 2018:108).

##### Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2018:111) Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Autokorelasi dapat dilihat dengan menggunakan uji Durbin Watson (DW-Test), dengan ketentuan meliputi:

- a. Angka D-W di bawah -2 berarti terdapat autokorelasi positif.
- b. Angka D-W diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi.

c. Angka D-W di atas +2 berarti terdapat autokorelasi negatif.

### Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Ghazali (2018:137) menyatakan bahwa cara untuk mendeteksinya dapat dilihat melalui pendekatan grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen (terikat) yaitu ZPRED dengan residualnya yaitu SRESID. Jika dalam grafik tersebut tidak membentuk pola tertentu yang teratur dan penyebaran data secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka menunjukkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas. Selain itu, uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan uji glejser yaitu dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya. Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residualnya lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

### Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih serta menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi berganda karena memiliki variabel independen lebih dari satu dan merupakan teknik uji yang menunjukkan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan umum dari Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (KKPD) adalah sebagai berikut:

$$KKPD = \alpha + \beta_1 PAD + \beta_2 DAU + \beta_3 DAK + e$$

Keterangan :

KKPD = Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

$\alpha$  = Konstanta

PAD = Pendapatan Asli Daerah

DAU = Dana Alokasi Umum

DAK = Dana Alokasi Khusus

$\beta_1 \beta_2 \beta_3$  = Koefisien regresi

e = Kesalahan gangguan (error)

### Uji Kelayakan Model

#### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan persamaan regresi dalam menjelaskan variasi variabel dependennya. Koefisien ini menjelaskan seberapa besar variabel dependen dipengaruhi oleh variabel independen. Semakin besar nilai koefisien determinasi, maka semakin besar variabel independen dalam mempengaruhi perubahan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Tetapi karena  $R^2$  mengandung kelemahan mendasar yaitu bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam persamaan regresi, maka digunakanlah koefisien regresi yang telah disesuaikan atau disebut *Adjusted R Square*.

#### Uji Signifikansi Keseluruhan dari Regresi Sampel (Uji F)

Uji kesesuaian model (*Goodness of fit*) juga dikenal dengan uji F yang bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi layak dijadikan sebagai alat estimasi dalam penelitian. Hasil uji F dapat dilihat dalam tabel Anova dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Apabila nilai signifikansi  $F < 0,05$ , maka hal ini berarti model regresi yang terbentuk layak dijadikan sebagai alat estimasi dan dapat diuji lebih lanjut. Sebaliknya jika, nilai signifikansi  $F > 0,05$ , maka hal ini berarti model regresi yang terbentuk tidak layak dijadikan sebagai alat estimasi sehingga tidak dapat diuji lebih lanjut.

### Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji T)

Uji signifikansi parameter individual (Uji t) untuk menguji seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Untuk mengetahui pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikansi level 0,05 ( $\alpha=5\%$ ). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut: a) apabila tingkat signifikansi  $< 0,05$  maka dapat dikatakan hipotesis diterima yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen, b) apabila tingkat signifikansi  $> 0,05$  maka dapat dikatakan hipotesis ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (mean), serta standar deviasi (standard deviation) dari masing-masing variabel penelitian. Hasil dari analisis statistik deskriptif dari setiap variabel dijelaskan pada tabel 2 sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Hasil Uji Statistik Deskriptif**  
*Descriptive Statistics*

	<i>N</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
PAD	111	5,022	40,453	15,866	6,572
DAU	111	19,519	64,370	47,644	6,788
DAK	111	4,682	21,710	13,264	3,438
KKPD	111	5,287	68,394	20,260	11,142
Valid N (listwise)	111				

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran, 2020 (diolah)

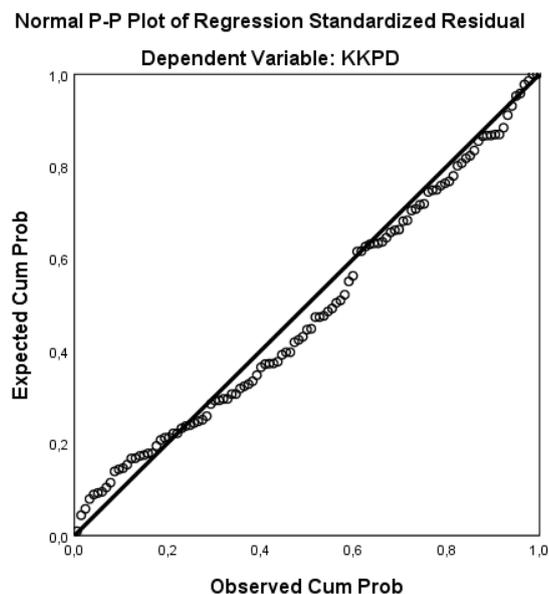
Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan jumlah observasi (N) dari penelitian ini sebanyak 111 observasi. Nilai minimum Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Timur adalah 5,022 yang dimiliki oleh Kabupaten Ngawi pada tahun 2018 dan nilai maksimum Pendapatan Asli Daerah adalah 40,453 yang dimiliki oleh Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2018. Nilai rata-rata Pendapatan Asli Daerah yaitu 15,866 dengan standar deviasi 6,572. Nilai minimum Dana Alokasi Umum di Provinsi Jawa Timur adalah 19,519 yang dimiliki oleh Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2018, sedangkan nilai maksimum Dana Alokasi Umum adalah 64,370 yang dimiliki oleh Kabupaten Blitar pada tahun 2017. Rata-rata Dana Alokasi Umum adalah 47,645 dan standar deviasinya sebesar 6,788. Nilai minimum dari Dana Alokasi Khusus di Provinsi Jawa Timur adalah 4,682 yang dimiliki oleh Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2016 dan nilai maksimum Dana Alokasi Khusus yaitu 21,710 yang dimiliki oleh kabupaten Blitar pada tahun 2017. Nilai rata-rata Dana Alokasi Khusus adalah 13,264 dengan standar deviasi sebesar 3,438. Nilai minimum Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 5,287 yang dimiliki oleh Kabupaten Ngawi pada tahun 2018 dan nilai maksimum sebesar 68,394 dimiliki oleh Kabupaten Sidoarjo tahun 2018. Rata rata Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 20,260 dan standar deviasi sebesar 11,142.

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui variabel residual atau pengganggu dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas dalam penelitian ini

dilakukan dengan analisis grafik normal probability plot. Berdasarkan hasil olah data, grafik normal P-Plot dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 2

Grafik Uji Normalitas

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran, 2020 (diolah)

Gambar 2 grafik normal P-Plot menunjukkan bahwa pola data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Sehingga dapat disimpulkan data berdistribusi normal dan model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Selain itu, normalitas dideteksi dengan uji statistik non-parametrik kolmogorov-smirnov dengan nilai signifikansi >0,05, maka data berdistribusi normal dan sebaliknya jika nilai signifikansi < 0,05 maka data berdistribusi tidak normal. Berdasarkan hasil olah data, hasil uji kolmogorov-smirnov disajikan sebagai berikut:

Tabel 2  
Hasil Uji Normalitas Data  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		111
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,58144657
Most Extreme Differences	Absolute	,073
	Positive	,073
	Negative	-,055
Test Statistic		,073
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>cd</sup>

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran, 2020 (diolah)

Berdasarkan hasil uji normalitas data dengan Kolmogorov-Smirnov pada Tabel 2, dapat terlihat bahwa nilai test statistiknya sebesar 0,073 dengan tingkat signifikansi 0,200. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 atau 0,200 > 0,05, sehingga data yang digunakan berdistribusi normal dan model regresi dalam penelitian memenuhi asumsi normalitas.

### Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk melakukan pengujian adanya kolerasi antar variabel bebas (independen) dalam model regresi yang digunakan. Cara yang digunakan

untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas dalam model regresi yaitu dengan melihat nilai Tolerance (TOL) dan Variance Inflation Factor (VIF). Apabila nilai  $TOL \leq 0,10$  dan nilai  $VIF \geq 10$ , maka tidak terjadi multikolinieritas.

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Multikolonieritas**  
*Coefficients<sup>a</sup>*

Model	Collinearity Statistics		Keterangan	
	Tolerance	VIF		
1	(Constant)			
	PAD	,617	1,621	Bebas Multikolonieritas
	DAU	,745	1,342	Bebas Multikolonieritas
	DAK	,727	1,376	Bebas Multikolonieritas

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran, 2020 (diolah)

Berdasarkan hasil output SPSS pada Tabel 3 diatas diperoleh hasil bahwa ketiga variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus memiliki nilai Tolerance lebih dari 0,10 dan nilai Variance Inflation Factor kurang dari 10. Dengan demikian, disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas antar variabel bebas atau independen dalam model regresi.

### Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t (saat ini) dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) dari model regresi yang digunakan dalam penelitian. Autokorelasi dapat dilihat dengan menggunakan uji Durbin-Watson. Pendeteksian ada atau tidaknya autokorelasi adalah dengan melihat nilai Durbin-Watson. Jika nilai Durbin-Watson yang dihasilkan berada diantara -2 hingga +2 berarti tidak terjadi gejala autokorelasi.

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Autokorelasi**  
*Model Summary<sup>b</sup>*

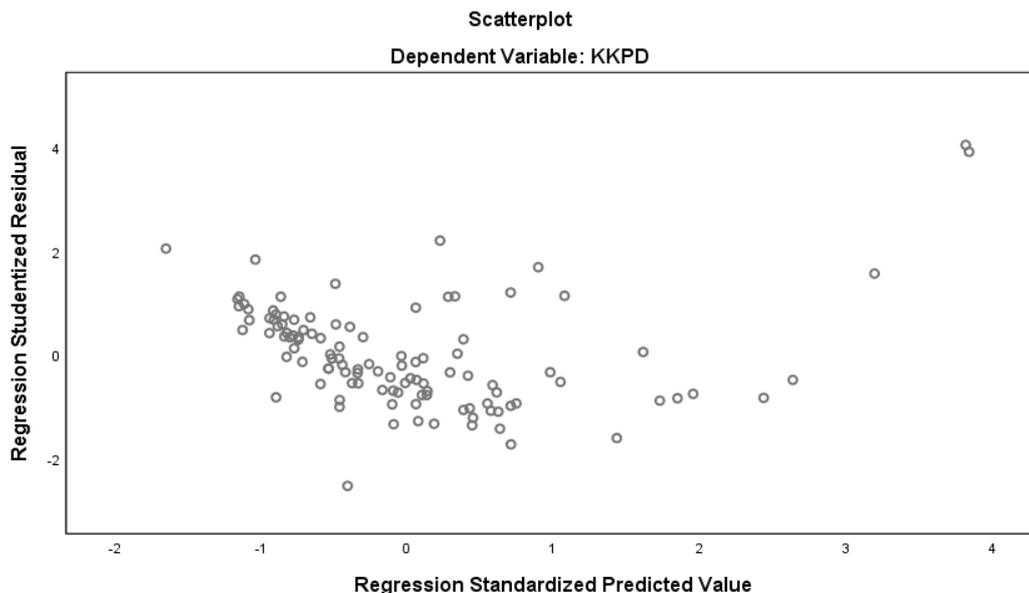
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,990 <sup>a</sup>	,980	,979	1,603463	1,122

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran, 2020 (diolah)

Dari hasil ouput SPSS dalam Tabel 4 diatas menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson yang dihasilkan sebesar 1,112. Berdasarkan asumsi ketentuan yang telah ditetapkan diatas, nilai Durbin-Watson berada diantara -2 sampai dengan +2. Sehingga kesimpulanya yaitu model regresi yang digunakan dalam penelitian tidak terjadi masalah autokorelasi.

### Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji adanya ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain dalam sebuah model regresi. Dalam mendeteksi masalah heteroskedastisitas dapat dilihat dari grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.



**Gambar 3**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**  
**Sumber: Laporan Realisasi Anggaran, 2020 (diolah)**

Berdasarkan Gambar 3 diatas menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk pola yang teratur dan jelas serta menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Sehingga disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi penelitian.

Selain itu uji heteroskedastisitas dapat dilihat melalui uji glejser. Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residualnya lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Glejser**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,135	,112		1,214	,228
PAD	,003	,012	,031	,280	,780
DAU	-,39	,026	-,164	-1,529	,129
DAK	,017	,015	,129	1,161	,248

**Sumber: Laporan Realisasi Anggaran, 2020 (diolah)**

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini juga menggunakan uji glejser, yaitu dengan cara meregresikan variabel independen(bebas) dengan nilai absolut residual dari regresi. Berdasarkan hasil pengujian heteroskedastisitas dengan menggunakan uji glejser pada Tabel 5 diatas, menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari masing-masing variabel adalah >0,05, sehingga artinya tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi penelitian.

**Analisis Regresi Linier Berganda**

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antar variabel dan menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen.

**Tabel 6**  
**Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-1,589	1,683		-,944	,347
PAD	1,644	,030	,970	55,504	,000
DAU	-,124	,026	-,075	-4,735	,000
DAK	,124	,052	,038	2,385	,019

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran, 2020 (diolah)

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda pada Tabel 6 diatas, maka diperoleh model persamaan regresi sebagai berikut:

$$KKPD = -1,589 + 1,644PAD - 1,24DAU + 1,24DAK + e$$

### Uji Kelayakan Model

#### Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Uji koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) digunakan untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) yaitu antara nol sampai dengan satu. Semakin besar nilai koefisien determinasi maka akan semakin baik dalam menjelaskan variabel dependennya.

**Tabel 7**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,990 <sup>a</sup>	,980	,979	1,603463	1,122

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran, 2020 (diolah)

Pada Tabel 7 disajikan hasil uji koefisien derterminasi atau R Square (R<sup>2</sup>) yang menunjukkan nilai sebesar 0,98. Hal tersebut berarti 98% variasi atau perubahan dalam kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dijelaskan dan memiliki hubungan yang kuat dengan ketiga variabel independennya yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Sedangkan sisanya sebesar 2% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

### Uji Signifikansi Keseluruhan dari Regresi Sampel

Uji F digunakan untuk mengetahui model regresi layak digunakan atau tidak. Uji statistik F menunjukkan apakah ada pengaruh signifikan antara variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji F dapat dijelaskan dengan menggunakan analysis of variance (ANOVA) dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05 atau 5%. Apabila nilai signifikan <0,05, maka hal ini berarti bahwa persamaan regresi dalam penelitian layak dan dapat digunakan pada analisis berikutnya.

**Tabel 8**  
**Hasil Uji Keseluruhan Dari Regresi Sampel (Uji F)**  
**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	13380,522	3	4460,174	1734,738	,000 <sup>b</sup>
	Residual	275,107	107	2,571		
	Total	13655,629	110			

Sumber: ILaporan Realisasi Anggaran, 2020 (diolah)

Berdasarkan Tabel 8 diatas, hasil uji F menunjukkan bahwa F hitung sebesar 1734,738 dengan tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05, yang berarti bahwa model regresi layak untuk digunakan dalam penelitian. Model regresi dapat digunakan untuk menjelaskan variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

**Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji T)**

Uji T bertujuan mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Cara yang digunakan dalam uji T yaitu dengan melihat tingkat signifikansi sebesar 0,05. Jika nilai signifikan < 0,05, maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen secara individu. Sebaliknya, apabila nilai signifikan > 0,05 maka tidak terdapat pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen.

**Tabel 9**  
**Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual ( Uji T)**  
*Coefficients<sup>a</sup>*

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-1,589	1,683		-,944	,347
PAD	1,644	,030	,970	55,504	,000
DAU	-,124	,026	-,075	-4,735	,000
DAK	,124	,052	,038	2,385	,019

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran, 2020 (diolah)

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 9 menunjukkan hasil sebagai berikut: (a) Hasil penelitian menunjukkan bahwa koefisien regresi PAD bernilai positif dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Artinya Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Sehingga hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis pertama (H1) yang telah ditetapkan. (b) Hasil penelitian menunjukkan bahwa koefisien regresi DAU bernilai negatif dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Sehingga Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis kedua (H2) yang telah ditetapkan. (c) Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koefisien regresi bernilai positif dengan tingkat signifikansi sebesar 0,019 yang lebih kecil dari 0,05. Sehingga Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis ketiga (H3) yang telah ditetapkan.

**Pembahasan**

**Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Hasil yang diperoleh dari pengujian hipotesis yaitu nilai koefisien regresi berganda dari Pendapatan Asli Daerah sebesar 1,644 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000, yang berarti bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Sehingga hipotesis pertama (H1) dalam penelitian ini diterima. Kondisi ini dapat diartikan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah akan mengakibatkan peningkatan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur.

Pendapatan Asli Daerah yang digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai program kerja pemerintah daerah, akan mengakibatkan peningkatan

pembangunan dan tersedianya sarana-prasarana yang semakin memadai untuk menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada tahun berikutnya. Sehingga dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah tersebut akan mengakibatkan peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah dalam hal kemandirian keuangan daerah. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang tinggi akan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi, sehingga kemandirian keuangan pemerintah akan semakin baik. Selain itu, peningkatan Pendapatan Asli Daerah akan mengakibatkan peningkatan kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang telah melakukan pembayaran pajak dan retribusi, sehingga hal ini dapat menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kinerja keuangan yang baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Budianto dan Alexander (2016) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Abdullah et.al, (2015) dan Ayu (2018) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

### **Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Hasil yang diperoleh dari pengujian hipotesis yaitu nilai koefisien regresi berganda dari Dana Alokasi Umum sebesar -0,124 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000, yang berarti bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Sehingga hipotesis kedua (H2) dalam penelitian ini diterima. Kondisi ini dapat diartikan peningkatan Dana Alokasi Umum akan mengakibatkan penurunan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur.

Besarnya Dana Alokasi Umum yang diterima suatu daerah, maka akan menurunkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hal tersebut dikarenakan pada umumnya dana ini banyak digunakan untuk memenuhi belanja rutin daerah yang tidak produktif, sehingga tidak memberikan kontribusi terhadap peningkatan program kerja pemerintah daerah. Meskipun Dana Alokasi Umum yang diterima oleh pemerintah daerah cukup besar, hal tersebut tidak dapat menunjang peningkatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat melalui sarana dan prasarana. Hal ini mengakibatkan pemerintah daerah tidak dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya. Sehingga pemerintah daerah tetap memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan pendanaan dari Pemerintah Pusat dan menurunkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ariani dan Putri (2018) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Putri (2016) dan Handayani (2013) yang mengatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

### **Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Hasil yang diperoleh dari pengujian hipotesis yaitu nilai koefisien regresi berganda dari Dana Alokasi Khusus sebesar 0,124 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,019, yang berarti bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Sehingga hipotesis ketiga (H3) dalam penelitian ini ditolak. Kondisi ini dapat diartikan peningkatan Dana Alokasi Khusus akan mengakibatkan peningkatan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur.

Pemberian Dana Alokasi Khusus mampu memberikan peran yang besar pada peningkatan penerimaan PAD yang digunakan untuk membiayai program kerja pemerintah daerah dalam meningkatkan pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga hal tersebut pada akhirnya akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mewujudkan kemandirian keuangan daerah pada tahun berikutnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Machmud dan Radjak (2018) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Sari (2016) yang menyatakan bahwa Dana Perimbangan yang didalamnya terdapat Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil dari pengujian dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini berarti semakin tinggi pendapatan asli daerah yang dapat diperoleh pemerintah daerah maka semakin tinggi pula kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber utama pembiayaan yang digali dari potensi daerah itu sendiri sehingga dapat mencerminkan kondisi keuangan suatu daerah dalam hal kemandirian keuangan daerah. (2) Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan dana alokasi umum akan mengakibatkan penurunan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Penggunaan dana alokasi umum untuk belanja daerah sektor tidak produktif, akan mengakibatkan pemerintah daerah tidak dapat meningkatkan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat melalui sarana dan prasarana yang memadai. Hal tersebut menyebabkan pemerintah daerah terus bergantung terhadap pendanaan dari pemerintah pusat sehingga menurunkan kinerja keuangan pemerintah daerah. (3) Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan dana alokasi khusus akan mengakibatkan peningkatan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Pemberian dana alokasi khusus dapat menunjang program kerja pemerintah daerah, sehingga pada akhirnya peningkatan dana alokasi khusus akan mengakibatkan peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah.

### **Saran**

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang memerlukan perbaikan dan pengembangan yang harus dilakukan pada penelitian selanjutnya yaitu sebagai berikut: (1) Objek penelitian yang digunakan hanya terbatas pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur sehingga hasil penelitian tidak dapat mewakili secara umum daerah selain dari Jawa Timur dan data yang diteliti terbatas dengan rentang waktu tiga tahun yaitu 2016 sampai dengan 2018. (2) Variabel independen yang digunakan terbatas hanya pada Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus serta data yang digunakan hanya data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berdasarkan keterbatasan dan simpulan, maka saran yang dapat diajukan berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Bagi pemerintah daerah, diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerahnya terutama penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dengan cara lebih menggali lagi potensi sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Selain itu, pemerintah daerah diharapkan agar mengalokasikan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus yang diterima pada sektor yang produktif dan sesuai dengan kebutuhan khusus sehingga dapat meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah pada tahun berikutnya. (2) Bagi penelitian selanjutnya diharapkan untuk memperluas objek penelitian dan memperpanjang periode penelitian agar hasil yang diperoleh lebih mungkin untuk disimpulkan secara umum. Selain itu, disarankan untuk menggunakan variabel independen lain, misalnya Dana Bagi Hasil dan Belanja Modal. Serta menggunakan indikator lain dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah diantaranya adalah

rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio pertumbuhan. (3) Bagi masyarakat, instansi maupun wajib pajak lainnya agar memiliki kesadaran untuk membayar pajak tepat waktu dengan tidak melampaui batas pembayaran.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, D. Asmawanti, dan Febriansyah. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Bagian Selatan. *Jurnal Akuntansi* 3(1): 41-67.
- Antari, N. P. G. dan Sedana, I. B. P. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen Unud* 7(2): 1080-1110.
- Anwar, D. K. 2019. Determinan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2017. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta.
- Ariani, K. R. dan G. A. Putri. 2016. Pengaruh Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Seminar Nasional dan The 3rd Call For Syariah Paper (SANCALL) 2016*. Universitas Muhammadiyah Surakarta: 364-369.
- Ayu, P. P. 2018. Analisis PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemda Se-Jawa Barat. *Jurnal Akuntansi & Ekonomi FE. UN PGRI Kediri* 3(1): 80-96.
- Budianto dan S. W. Alexander. 2016. Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara". *Jurnal EMBA* 4(4): 844-851.
- Djuniar L, dan I. Zuraida. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis* 3(2): 445-455.
- Ghozali, I. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Edisi Kesembilan. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.
- Halim, A. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. Salemba Empat. Jakarta.
- Halim, A. dan M. S. Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Empat. Salemba Empat. Jakarta.
- Hamdani, S. 2014. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur. Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman.  
[https://www.academia.edu/10095917/PENGARUH\\_DANA\\_ALOKASI\\_UMUM\\_DAU\\_DAN\\_PENDAPATAN\\_ASLI\\_DAERAH\\_PAD\\_TERHADAP\\_BELANJA\\_DAERAH\\_PADA\\_KABUPATEN\\_KOTA\\_DI\\_PROVINSI\\_KALIMANTAN\\_TIMUR](https://www.academia.edu/10095917/PENGARUH_DANA_ALOKASI_UMUM_DAU_DAN_PENDAPATAN_ASLI_DAERAH_PAD_TERHADAP_BELANJA_DAERAH_PADA_KABUPATEN_KOTA_DI_PROVINSI_KALIMANTAN_TIMUR). Diakses tanggal 1 November 2019 (20:17).
- Handayani, N. L. P. 2013. Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.  
[https://www.academia.edu/36315544/ANALISIS\\_PENGARUH\\_KARAKTERISTIK\\_PEMERINTAH\\_DAERAH\\_TERHADAP\\_KINERJA\\_KEUANGAN\\_PEMERINTAH\\_DAERAH\\_Studi\\_Empiris\\_Pada\\_Pemerintah\\_Kabupaten\\_Kota\\_di\\_Jawa\\_Tengah](https://www.academia.edu/36315544/ANALISIS_PENGARUH_KARAKTERISTIK_PEMERINTAH_DAERAH_TERHADAP_KINERJA_KEUANGAN_PEMERINTAH_DAERAH_Studi_Empiris_Pada_Pemerintah_Kabupaten_Kota_di_Jawa_Tengah). Diakses pada tanggal 15 November 2019 (20:05).
- Indriani, D. dan U. Sastradipraja. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Portofolio UNJANI* 11(1): 55-76.
- Jefri, R. 2018. Teori Stewardship dan Good Governance. *Jurnal Riset Edisi XXVI* 4(003): 14-28.
- Julitawati, E., Darwanis dan Jalaludin. 2012. Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* 1(1): 15-29

- Kamaroelah, R.A. 2017. Analisis Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Nuansa* 14(1): 123-138.
- Machmud, J., dan L. I. Radjak. 2018. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo. *Journal Of Accounting Science (JAS)* 2(1): 17-32.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Panduan Bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial, dan Politik*. Edisi Kedua. UPP STIM YPKN. Yogyakarta
- Marizka, R. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten Dan Kota di Sumatera Barat (Tahun 2006-2011). *Artikel Ilmiah*. Universitas Negeri Padang.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 *Dana Perimbangan* 9 Desember 2005. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. Nomor 8 Tahun 2006 *Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*. 3 April 2006. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25. Jakarta
- Putri, N. K. N. I. dan N. P. A. Darmayanti, 2019. Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali". *E-Jurnal Manajemen UNUD* 8(5): 2834-2861.
- Putri, E. D. 2016. Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya* 4(2): 1-14.
- Raharjo, E. 2007. Teori Agensi dan Teori Stewardship Dalam Persepektif Akuntansi. *Fokus Ekonomi* 2(1): 37-46.
- Ramadhan, P.N. 2018. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Purwokerto.
- Sari, I. P. 2016. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, PAD, Leverage, Dana Perimbangan Dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *JOM Fekon Universitas Riau* 3(1): 679-692.
- Soewardji, J. 2012. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Susanti, R. dan A. E. Ratih. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Periode 2011-2016. <http://repository.umrah.ac.id/1585/1/JURNAL%20REVI.pdf>. Diakses tanggal 24 Oktober 2019 (17.30).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. 2 Februari 2015. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. Nomor 9 Tahun 2015 *Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. 18 Maret 2015. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. Nomor 23 Tahun 2014 *Pemerintahan Daerah*. 30 September 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. Nomor 33 Tahun 2004 *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. Nomor 17 Tahun 2003 *Keuangan Negara*. 5 April 2003. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Jakarta.

- Wenny, C. D. 2012. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ilmiah STIE. MDP* 2(1): 39-51.
- Wiguna, K. Y. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Fordema* 12(1): 38-50.